

DETERMINASI KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN

Devia Ratna Sari¹, Fajar Syaiful Akbar²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur^{1,2}
fajarsa.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menunjukkan serta mengevaluasi dampak keterbukaan dan keterlibatan masyarakat terhadap efektivitas pemerintahan desa di Kecamatan Widang-Tuban. *Purposive sampling* yaitu metode yang dipakai dalam penelitian ini, dan dilakukan dengan memakai seperangkat kriteria. Model pengujian (*outer model*) serta model struktural (*inner model*) ialah dua dari sub-bab model yang membentuk metode analisis (SEM). Di luar model Validitas konvergen, validitas diskriminatif, dan reliabilitas ialah tiga tes. Tes model R, Q, dan FIT membentuk model bagian dalam, sebaliknya. Hasil penelitian. Simpulan, bahwasanya transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dan kedua partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Kinerja Pemerintah

ABSTRACT

This research aims to show and evaluate the impact of openness and community involvement on the effectiveness of village government in Widang-Tuban District. Purposive sampling is the method used in this research, and was carried out using a set of criteria. The testing model (outer model) and structural model (inner model) are two of the model sub-chapters that form the analysis method (SEM). Outside the model, convergent validity, discriminative validity, and reliability are three tests. The R, Q, and FIT model tests form the inner model, conversely. Research result. The conclusion is that transparency has a positive effect on the performance of the village government and secondly community participation has a positive effect on the performance of the village government.

Keywords: *Community Participation, Transparency, Government Performance*

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah desa yaitu ukuran kesuksesan sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuannya, disertai visi misi pemerintah desa yang sudah ditetapkan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut pengamatan peneliti memilih studi kasus Desa di Kecamatan Widang karena terjadi kurangnya transparansi terkait kinerja pemerintah desa. Dibuktikan dengan masih ada beberapa desa yang belum membuat papan informasi pemasukan dan pengeluaran dana desa. Kemudian masih sedikit desa yang belum bisa menggali potensi sumber-sumber untuk Pendapatan Asli Desa. Serta masih sedikit penelitian yang dilakukan di Desa Kecamatan Widang terkait penelitian ini. Dalam penelitian ini memakai objek 16 desa dalam satu kecamatan sementara penelitian terdahulu hanya memakai satu desa sebagai objek penelitian. Kemudian

penelitian terdahulu memakai teknik analisis SPSS v.20 for *Windows* sementara penelitian ini memakai teknik analisis Partial Least Square (PLS).

Dalam memenuhi syarat transparansi pemerintah desa diharapkan bisa terbuka terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap semua kegiatan dan program yang dilaksanakan. Menurut Djmiraga dan Widajantie, (2022) transparansi diperlukannya masyarakat dalam memberikan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Dengan adanya sikap keterbukaan dari aparat pemerintah desa dapat mewujudkan hubungan timbal-balik yaitu antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat dan bisa menambah pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan serta meminimalisir pelanggaran yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Firdaus et al., (2020) dalam mewujudkan good governance. Masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam mencapai pemerintahan yang efektif, khususnya dalam hal keterlibatan. Partisipasi ialah keterlibatan masyarakat, individu, atau kelompok dalam inisiatif pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang menganut asas pemerintahan yang baik, maka masyarakat desa dituntut untuk bergantung pada pengelolaan uang desa dan perumusan kebijakan.

Aparat desa harus tampil dengan fokus pada kebutuhan masyarakat karena mereka bekerja untuk organisasi sektor publik. Mereka juga harus mendorong ketanggapan pemerintah desa terhadap lingkungan dengan berusaha memberi pelayanan maksimal secara transparan dan bermutu serta mempunyai pembagian kerja yang baik di antara perangkat desa. Kinerja pemerintah desa yaitu indikator seberapa baik pengelolaan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu (Nurhazizal et al., 2019). Sebagai tujuan penelitian dipilih seluruh desa yang ada di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Ada masalah dengan perilaku inkonsisten pejabat pemerintah desa Kecamatan Widang sehubungan dengan hasil kinerja yang diharapkan. Lalu ada fenomena atau kasus yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Widang, dimana kepala desa menyalahgunakan anggaran desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardiyanti, T. K. & Budiwitjacksono, G. S. (2021).

Tabel 1.
Tingkat Rasio Kemandirian Desa di Kecamatan Widang Tahun 2021

No.	Desa	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
1.	Desa Simorejo	136.351.500,00	1.321.524.981,00	10,3%
2.	Desa Tegalrejo	15.000.000,00	1.512.422.539,00	0,9%
3.	Desa kedungharjo	569.764.100,00	1.235.130.934,00	46,1%
4.	Desa Tegalsari	716.600.000,00	1.307.362.153,00	54,8%
5.	Desa Banjar	150.000.000,00	1.184.453.286,00	12,6%
6.	Desa Ngadirejo	511.000.000,00	1.574.509.483,00	32,4%
7.	Desa Ngadipuro	631.400.000,00	1.319.124.395,00	47,8%
8.	Desa Bunut	91.278.000,00	774.698.000,00	11,7%
9.	Desa Patihan	158.135.500,00	1.356.997.692,00	11,6%
10.	Desa Widang	405.260.000,00	1.623.645.967,00	24,9%

11.	Desa Kujung	88.600.000,00	1.478.695.487,00	5,9%
12.	Desa Mlangi	706.988.000,00	1.446.693.560,00	48,8%
13.	Desa Sumberjo	336.000.000,00	1.376.914.702,00	24,4%
14.	Desa Minohorejo	56.000.000,00	1.397.631.515,00	4%
15.	Desa Mrutuk	382.600.000,00	1.356.067.384,00	28,2%
16.	Desa Comprong	125.900.000,00	1.352.255.470,00	9,3%

Pada umumnya ada keterkaitan transparansi dan partisipasi masyarakat dengan kinerja pemerintah desa, yakni jika transparansi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka akan menghasilkan kinerja pemerintah yang efisien dan efektif. Akan tetapi jika transparansi dan partisipasi masyarakat tidak dilakukan sesuai dengan peraturan maka akan menghasilkan kinerja pemerintah desa yang rendah. Oleh karena itu pemerintah desa harus meningkatkan atau konsisten terhadap prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat agar tercipta kinerja yang baik. Namun kenyataannya jika dilihat dari tabel diatas hasil rata-rata rasio kemandirian pada desa di Kecamatan Widang masih tergolong rendah yaitu dikarenakan adanya pendapatan transfer yang begitu tinggi dibandingkan dengan pendapatan desa tersebut. Bisa ditarik simpulan bahwa masih minimnya kapasitas dalam menemukan potensi berbagai sumber PAD yang bisa terlihat dari total pendapatan desa lebih rendah dibandingkan pendapatan transfer. Disebabkan oleh PADes yang rendah, mengartikan bahwa ada kecenderungan yang masih belum terampil serta usaha desa dalam melaksanakan penggalian serta manajemen sumber pendapatan. Kemudian terdapat kasus dari salah satu kepala desa yang korupsi penyalah gunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tentunya prinsip transparansi masih kurang dikarenakan tidak bisa mempertanggungjawabkan dan transparan terhadap amanah yang telah diberikan. Sehingga kinerja tersebut belum maksimalnya dalam menjalankan pemerintah desa. Maka penelitian ini tujuannya adalah untuk membahas transparansi serta partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

KAJIAN TEORI

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* yaitu situasi kepemimpinan diarahkan untuk mencapai prestasi yang pada akhirnya akan menguntungkan organisasi daripada kepentingan individu. Secara teoritis, *stewardship* Steward akan menjaga dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, dengan asumsi terdapat korelasi yang signifikan antara keberhasilan organisasi dan kebahagiaan pemilik. Ini akan memaksimalkan fungsi utilitas. Sebagai pelayan masyarakat (*steward*), pemerintah desa didorong oleh kepentingan bersama dan merasa berkewajiban untuk mengelola uang desa secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Transparansi

Secara umum, transparansi yaitu sarana yang begitu penting dalam memenuhi kebutuhan publik akan keingintahuannya terkait pelaksanaan pemerintahan di daerahnya sendiri dan guna memberikan informasi yang diperlukan oleh publik. Transparansi ialah keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh public

(Wulandari, T. A. & Handayani, N. 2019). Ada publikasi terkait rincian anggaran desa dan laporan berkala terkait pengelolaan anggaran kepada publik. Masyarakat mendapatkan akses terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan sederhana dalam perwujudan good governance. Mewujudkan beberapa metrik lainnya akan tergantung pada seberapa mudah dan transparan informasi tentang manajemen pemerintahan dapat diakses oleh publik.

Partisipasi Masyarakat

Agar masyarakat mendapatkan manfaat dari suatu kebijakan program, maka harus ada keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program atau pengambilan keputusan. Semua warga mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun dengan lembaga yang bertindak sebagai perantara dan mewakili kepentingannya (Kumalasari, D. R. & Widajantie, T. D. 2022). Partisipasi dipandang dan dipakai sebagai cara untuk mengkomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat umum. Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi bisa menciptakan pemerintahan desa yang demokratis yang berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat mendongkrak potensi yang melekat pada masyarakat desa.

Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja ialah hasil dari program atau kegiatan yang telah ataupun akan diselesaikan berkaitan dengan pemakaian anggaran serta telah dapat diukur secara kuantitas dan kualitas. Kinerja pemerintahan atau organisasi desa yaitu tolak ukur seberapa berhasil suatu entitas mencapai tujuannya, serta visi dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau entitas desa. Pencapaian atau kegagalan tujuan organisasi yang ditetapkan dengan demikian dapat ditentukan oleh kinerja organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ialah metode yang dipakai dalam penelitian ini. Pemerintah Desa di Kecamatan Widang akan menjadi subjek penelitian untuk penelitian ini. Pemerintah desa yaitu Variabel Dependen (Dependent Variable). Efektivitas operasi administrasi dan keuangan organisasi atau lembaga, mulai dari perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, disebut sebagai kinerja. variabel tidak bias (variabel tidak bias). Dalam penelitian ini, dipakai dua variabel independen: partisipasi masyarakat (X2), yang memastikan bahwa setiap warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui mediasi lembaga-lembaga yang sah yang mewakili kepentingannya. Transparansi (X1) ialah asas yang memungkinkan masyarakat mengetahui atau memperoleh akses informasi yang seluas mungkin terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jenis keterlibatan ini didasarkan pada prinsip kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan keterlibatan konstruktif. Skala Ordinal dipakai sebagai skala pengukuran dalam penelitian ini. Skala Likert kemudian dipakai sebagai metode untuk menilai sikap.

Kecamatan Widang berjumlah 16 desa, antara lain Simorejo, Tegalrejo, Kedungharjo, Tegalsari, Banjar, Widang, Ngadirejo, Ngadipuro, Bunut, Patihan, Kujung, Mlangi, Sumberjo, Minohorejo, Mrutuk, dan Comprang yang berpenduduk penelitian ini. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini ialah purposive sampling, dan persyaratan pertama ialah setiap desa diwakili oleh 5 orang, termasuk kepala, sekretaris, perencanaan, keuangan, dan umum dan administrasi. Terdapat 80 responden dalam penelitian ini yang memenuhi persyaratan tersebut karena masa kerja minimal kepala

desa, sekretaris desa, petugas perencanaan, dan petugas keuangan ialah dua tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan memakai pendekatan kuesioner. Perangkat desa Kecamatan Widang mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti untuk penelitian ini. Pendekatan ini dianggap sebagai wawancara tertulis. Metode analisis penelitian ini memakai software Partial Least Square (PLS) WarpPLS 7.0. pendekatan analitis Model persamaan struktural (SEM) terdiri atas dua sub-bab model, model pengukuran dan model struktural, yang juga dikenal sebagai inner model dalam publikasi tertentu (Abdillah, W. & Hartono, J. 2015).

HASIL PENELITIAN

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Konvergen Outer Loading Tahap 1

	Transparansi (X1)	Partisipasi Masyarakat (X2)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
X1.1	(0.818)	0.214	-0.079
X1.2	(0.800)	0.057	-0.025
X1.3	(0.710)	-0.471	0.178
X1.4	(0.797)	0.189	-0.079
X1.5	(0.748)	0.146	-0.130
X1.6	(0.533)	-0.275	0.221
X2.1	0.242	(0.803)	0.014
X2.2	0.256	(0.739)	-0.111
X2.3	-0.443	(0.751)	0.214
X2.4	0.456	(0.719)	-0.146
X2.5	-0.547	(0.691)	0.022
Y.1	-0.154	0.226	(0.719)
Y.2	-0.399	0.188	(0.629)
Y.3	0.304	-0.321	(0.712)
Y.4	0.139	0.031	(0.744)
Y.5	0.054	-0.097	(0.779)

Terdapat tiga bendera merah dengan nilai pembebanan luar di bawah 0,70 pada tahap pertama. Karena ketidakmampuan indikator untuk mencapai kriteria batas pengukuran minimum, maka harus dihilangkan. Akibatnya, pengujian validitas konvergen dilakukan lagi dengan memakai outer loading tahap kedua.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Konvergen Hasil Outer Loading Tahap 2

	Transparansi (X1)	Partisipasi Masyarakat (X2)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
X1.1	(0.829)	0.310	-0.086
X1.2	(0.784)	0.129	0.009
X1.3	(0.708)	-0.640	0.228
X1.4	(0.814)	0.002	-0.049
X1.5	(0.781)	0.119	-0.074

X2.1	0.091	(0.849)	0.018
X2.2	0.073	(0.777)	-0.101
X2.3	-0.496	(0.700)	0.229
X2.4	0.282	(0.756)	-0.129
Y.1	-0.095	0.177	(0.768)
Y.3	-0.545	0.317	(0.700)
Y.4	0.371	-0.165	(0.704)
Y.5	0.245	0.306	(0.788)

Semua indikator masih valid setelah dua fase eliminasi, sesuai dengan pembebanan luar Tabel 3 pada langkah kedua. Karena semua nilai loading factor lebih dari 0,70 dan semua konstruk dipertahankan dalam model, maka indikator tersebut dapat dinyatakan valid.

Tabel 4.
Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Transparansi (X1)	(0.784)
Partisipasi Masyarakat (X2)	(0.772)
Kinerja Pmerintah Desa (Y)	(0.741)

Untuk menunjukkan bahwa tanggapan dari responden yang mendasarkan tanggapan mereka pada komentar tentang variabel laten lainnya tidak dikacaukan, validitas diskriminan dipakai. Jika varians rata-rata diekstrak (AVE) untuk semua konstruksi lebih besar dari atau sama dengan 0,5 dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan atau disarankan, validitas diskriminan ditetapkan. Akibatnya, karena setiap variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa semua data dari variabel akurat dan dapat diandalkan.

Tabel 5.
Composite Reliability Coefficient dan Cronbach's Alpha Coefficient

	X1	X2	Y	Kriteria	Keterangan
<i>Composite Reliability</i>	0.888	0.855	0.829	> 0.7	Reliable
<i>Cronbach' sAlpha</i>	0.843	0.773	0.725	> 0.6	Reliable

Masing-masing nilai *Composite Reliability* untuk variabel X1, X2, dan Y ialah 0,888, 0,855, dan 0,829. Sementara masing-masing variabel untuk Cronbach's Alpha dievaluasi memakai X1, X2, dan Y yang mempunyai nilai masing-masing senilai 0,843, 0,773, dan 0,725. Semua variabel memenuhi kriteria uji reliabilitas, sesuai dengan temuan *Composite Reliability* dan Cronbach's Alpha.

Tabel 6.
Hasil Output Model Fit

	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC	0.249	0.005	$P < 0,05$	Diterima
ARS	0.218	0.010	$P < 0,05$	Diterima
AVIF	2.390	Good if < 5	AVIF < 5	Diterima

Berdasarkan temuan di atas, APC mempunyai indeks 0,249 dan nilai p 0,005 sementara ARS mempunyai indeks 0,218 dan nilai p 0,010 sesuai dengan kriteria APC, dan ARS sudah memenuhi persyaratan karena mempunyai nilai p -nilai 0,05. Dan berdasarkan data, nilai AVIF yang seharusnya 5 sudah terpenuhi karena menjadi 2.390.

Tabel 7.
R Square

	X1	X2	X3	Y
R Square				0,218

Evaluasi model struktural pada tabel 7 dengan variabel Kinerja Pemerintah Desa (Y) nilai R-square senilai 0,218. Akibatnya, pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh variabel independen senilai 0,218 atau 21,8, sementara sisanya senilai 78,2 dipaparkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

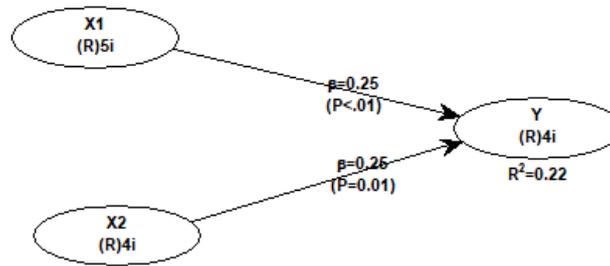
Tabel 8.
Q Square

	X1	X2	X3	Y
Q Square				0,222

Kinerja Pemerintah Desa (Y), variabel nilai Q-square, dengan nilai 0,222 pada evaluasi model struktural Tabel 8 Q². Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa yaitu variabel dependen, dan besarnya hubungan antara keduanya ialah 0,222 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut mempunyai nilai *predictive relevance* karena nilai Q²>0. Konsekuensinya, dapat dikatakan bahwa prediksi model mempunyai kebaikan yang baik.

Tabel 9.
Path Coefficient, P – Values, Dan Effect Sizes For Path

Kriteria	Variabel	X1	X2	Y
Path Coefficients	X1	-	-	-
	X2	-	-	-
	X3	-	-	-
	Y	0.251	0.246	-
P-Value	X1	-	-	-
	X2	-	-	-
	X3	-	-	-
	Y	0.009	0.010	-
Effect sizes for path	X1	-	-	-
	X2	-	-	-
	X3	-	-	-
	Y	0.110	0.108	-



Gambar 1. Hasil Penelitian
 Sumber: Data diolah Peneliti 2023

Persamaan Struktural: $Y = (0.251)(X1) + 0,246 (X2)$

Keterangan:

- Y : Kinerja Pemerintah Desa
- X1 : Transparansi
- X2 : Partisipasi Masyarakat

Tabel 9.
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dikecamatan widang	Diterima
H2	Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dikecamatan widang	Diterima

PEMBAHASAN

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Diakui bahwa keterbukaan berdampak pada seberapa baik kinerja pemerintah desa berdasarkan temuan uji untuk model luar dan dalam. Diterimanya hipotesis kedua ini mungkin disebabkan oleh persepsi masyarakat desa terhadap transparansi di Kecamatan Widang yang begitu baik karena menunjukkan bahwa masyarakat desa di Kecamatan Widang mungkin percaya bahwa semakin terbuka pemerintah desa kepada masyarakat, semakin baik pula kinerja perangkat desa akan Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2022) yang menemukan bahwa transparansi berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, kemudian penelitian yang dilakukan Yuliana et al. (2022) yang menemukan bahwa transparansi berdampak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, dan selaras dengan penelitian Jatmiko (2020) menemukan bahwa transparansi berdampak positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun bertolak belakang dengan penelitian Sukmawati, F. & Nurfitriani, A. (2019), menyatakan bahwa keterbukaan tidak berdampak pada pengelolaan keuangan desa bertentangan dengan pernyataan tersebut.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa diakui dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, menurut temuan pengujian outer model dan inner model. Masyarakat dapat mendorong partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa jika premis ketiga diterima, yang

menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan perlunya berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Wardiyanti, T. K. & Budiwitjaksono, G. S. (2021) yang menemukan bahwa keterlibatan masyarakat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa di Panglungan, dan dengan penelitian Kumalasari & Widajantie, (2022) yang menemukan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa di Kebalando. Namun berbeda dengan penelitian Dewi, F. G. R. (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

SIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari pengujian dan pembahasan temuan bab sebelumnya tentang dampak pelibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi terhadap fungsi pemerintahan desa di Kecamatan Widang: (1) Pemerintah desa Kecamatan Widang berkinerja lebih baik ketika ada transparansi. (2) Di Kecamatan Widang, pemerintahan desa berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamiraga dan Widajantie. (2022). *Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kelurahan Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya*. 4(11), 4806–4814. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2318>
- Dewi. (2020). Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2881>
- Permata Sari, A. D. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 86–96. Retrieved from <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/218>
- Firdaus, A. et al. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 291–300. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Kumalasari, D. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalando. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1116. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2318>
- M, N. et al. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: Good Governance Sebagai Pemeditasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 80–92. <https://www.neliti.com/publications/34024/pengaruh-corporate-social-responsibility-leverage-likuiditas-dan-ukuran-perusaha>
- Sukmawati, & Nurfitriani. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut).

- Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66. <https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120>
- Wardiyanti, T. K., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). the Effect of Competence, Transparency, Accountability, and Participation on Village Government Performance. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 469–483. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2104>
- Wulandari, T. A., & Handayani, N. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2714>
- Yuliana, Y. et al. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Desa-Desa Pada Kabupaten *Jurnal Sistem Informasi ...*, 2(1). <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai/article/view/254>